

**PELAKSANAAN GOOD TOURISM GOVERNANCE OLEH PEMERINTAH DESA
DAN STAKEHOLDERS DI DESA ALIANTAN KECAMATAN KABUN
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022**

Oleh: Nengsih Manalu

Dosen Pembimbing: Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru

28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research delves into the implementation of the Good Tourism Governance (GTG) concept by the village government and stakeholders in Aliantan Village, particularly in the context of tourism management. The main objective of the research is to analyze the management carried out by the village government and stakeholders in applying the principles of GTG for tourism development. The research method employed is a qualitative approach through in-depth interviews with the village government, local stakeholders, and tourism observers. This approach is designed to gain a profound understanding of the implementation practices of GTG and the roles of stakeholders in tourism management in Aliantan Village.

The research results indicate that the village government has implemented several measures in applying the concept of Good Tourism Governance (GTG) for tourism development in Aliantan Village. The steps taken include active involvement of various stakeholders in the decision-making process, transparency in resource management, and community participation in the planning and implementation of tourism activities. However, the study identified some challenges, including a lack of effective coordination between the village government and stakeholders, potentially hindering the implementation of Good Tourism Governance. Awareness of the importance of GTG in sustainable tourism development is also identified as an area that needs improvement.

The research concludes that although efforts have been made to implement the principles of Good Tourism Governance, there is a need for further steps to strengthen collaboration between the village government and stakeholders. Additionally, an enhanced understanding of GTG at the local level is considered essential to improve the effectiveness of tourism management in Aliantan Village. These findings provide actionable insights for improving the quality of GTG implementation at the village level and offer direction for future improvement efforts.

Keywords: Aliantan Village, Good Tourism Governance, Tourism Development, Tourism Sustainability, Village Government

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tata kelola yang baik, sering disebut sebagai *good governance*, telah menjadi fokus utama dalam manajemen sumber daya wilayah di berbagai negara. Konsep ini menekankan pentingnya etika yang terbuka, transparan, akuntabel, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *Good governance* menempatkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan lembaga pemerintah, dengan tujuan mewujudkan cita-cita negara.

Dalam konteks tata kelola pariwisata, konsep *good governance* juga menjadi kunci penting dalam pengelolaan sektor pariwisata. Pariwisata, sebagai perjalanan sementara untuk mencari keseimbangan, kebahagiaan, dan pemahaman terhadap beragam aspek kehidupan, membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip *good governance*. Upaya untuk mewujudkan *good tourism governance* melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga kekuasaan dalam pengelolaan pariwisata tidak hanya berada di tangan pemerintah semata.

Di Indonesia, pembangunan sektor pariwisata diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan. Undang-undang ini menetapkan bahwa kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, serta kelestarian lingkungan hidup. Penerapan *good tourism governance* juga tercermin dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), yang menetapkan enam pilar utama dalam pembangunan kepariwisataan nasional: atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, masyarakat, dan investasi.

Namun, implementasi *good tourism governance* tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sebagai pelaksana utama kebijakan pariwisata di tingkat lokal. Melalui konsep desentralisasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola kepariwisataan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan *good tourism governance*. Hal ini juga sesuai dengan prinsip keberlanjutan, yang menuntut

agar pengelolaan pariwisata tidak hanya mengutamakan pendapatan dan jumlah wisatawan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekosistem dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan *good tourism governance* oleh Pemerintah Desa dan para stakeholders di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai studi kasus. Desa Aliantan dipilih karena memiliki potensi wisata yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai desa wisata oleh pemerintah daerah. Namun, tantangan dalam pengelolaan wisata di wilayah hutan lindung Suligi Batu Gajah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pengelolaan pariwisata, menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Good Tourism Governance oleh Pemerintah Desa dan Stakeholder di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Rokan Hulu tahun 2022?

KERANGKA TEORI

Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik, menurut Sunaryo (2013:77), mencakup koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan serta partisipasi aktif yang sinergis antara pemerintah, swasta/industri pariwisata, dan masyarakat. Penyelenggaraan dan juga Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, juga menurut Sunaryo (2013), akan mudah dikenali melalui ciri-ciri penyelenggaraan yang berbasis pada 10 prinsip berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Terkait dalam menentukan visi, misi, dan tujuan kepariwisataan;
2. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan;
3. Kemitraan kepemilikan lokal;
4. Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan;
5. Mengakomodasi aspirasi masyarakat;
6. Daya dukung lingkungan;
7. Monitoring dan evaluasi;
8. Akuntabilitas lingkungan;
9. Pelatihan bagi masyarakat terkait;
10. Serta promosi dan advokasi nilai budaya lokal.

Dengan demikian, prinsip-prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik seperti yang diuraikan Sunaryo (2013), menjadi kunci dalam pengembangan

sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan *stakeholder* di desa Aliantan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif yaitu di dalam penelitian ini dibutuhkan metode untuk dapat menemukan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan *good governance tourism* yang dilakukan oleh pemerintah desa dan *stakeholders* di desa Aliantan melalui program ataupun kebijakan terhadap fenomena-fenomena yang ada dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi Pustaka dan dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Good Tourism Governance yang diperkenalkan oleh Sunaryo (2013). Teori ini mengacu pada prinsip pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang mencakup sepuluh indikator keberhasilan: Partisipasi masyarakat terkait, Keterlibatan seluruh pemangku

kepentingan, Kemitraan dengan pemilik lokal, Pemanfaatan sumber daya secara Berkelanjutan, Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat, Daya dukung lingkungan, Monitoring dan Evaluasi, Akuntabilitas Lingkungan, Pelatihan bagi masyarakat terkait, serta Mempromosikan dan Mengadvokasi Nilai Budaya Lokal. Berdasarkan proses observasi, wawancara, dan studi literatur yang dilakukan dengan merujuk pada sepuluh indikator keberhasilan tata kelola kepariwisataan, akan dibahas sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Menurut Sunaryo (2013), keberhasilan indikator ini dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan pembangunan pariwisata, serta dalam mengidentifikasi sumber daya yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Mereka juga diharapkan ikut serta dalam pelaksanaan rencana atau program yang telah disusun, serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan pariwisata. RKPMJ Dinas Pariwisata Rokan Hulu menegaskan peran penting masyarakat dalam memastikan bahwa pembangunan pariwisata berdampak positif terhadap kesejahteraan dan mengurangi dampak negatif.

Kesadaran masyarakat Desa Aliantan akan pentingnya menjaga kawasan mangrove untuk ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup mendorong mereka untuk mengadakan program ekowisata. Selain itu, mereka membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) The Caretaker untuk mengelola program dan melakukan pengawasan. Meskipun masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan ekowisata dengan mengumpulkan kayu dan memberikan laporan kerusakan atau penyalahgunaan sumber daya, masih ada kendala seperti minimnya partisipasi dalam mengidentifikasi sumber daya lokal dan jumlah masyarakat yang terlibat yang menghambat pencapaian visi pelestarian kampung.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Sesuai dengan prinsip Good Governance dan pandangan United Nations Commission on Sustainable Development yang menyatakan bahwa ekowisata adalah pariwisata berkelanjutan yang memastikan partisipasi aktif, efektif, dan setara dari seluruh pemangku kepentingan, Sunaryo (2013) juga menekankan bahwa

keterlibatan dan produktivitas pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan tata kelola yang baik dalam pembangunan pariwisata.

Pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam regulasi dan pengembangan pariwisata. Pemerintah pusat, melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta melalui program dan kerjasama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, juga menetapkan regulasi dan program pembangunan pariwisata sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Selain peran pemerintah, sektor swasta juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan pariwisata, terutama dalam menyokong pembangunan infrastruktur pariwisata. Swasta terlibat dalam berbagai bentuk, seperti lembaga non-profit yang memberikan dukungan tanpa mencari keuntungan langsung. Kontribusi mereka meliputi pendampingan, pelatihan, pembangunan fasilitas, dan monitoring program.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan, pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan dan berkontribusi bersama dengan masyarakat dan pemerintah, nyatanya tidak memiliki peran dalam pengembangan wisata di Desa Aliantan baik secara internal maupun eksternal, yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan pariwisata.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus memberikan peluang usaha yang luas bagi penduduk setempat. Semua fasilitas yang mendukung pariwisata harus dikelola dan dirawat oleh masyarakat lokal. Untuk memfasilitasi kepemilikan lokal ini, diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola lokal. Selain itu, keterlibatan aktor lain dalam mendukung kepemilikan lokal juga sangat penting untuk kesuksesan ini (Sunaryo 2013). Modal yang digunakan untuk pengembangan, baik terkait dengan Bukit Suligi di Desa Aliantan sendiri maupun fasilitas pariwisata lainnya, sering berasal dari kantong pribadi kepala desa dan tim Pokdarwis. Dana yang

dikumpulkan oleh masyarakat hanya digunakan sebesar 5%, sehingga sekitar 95% modal berasal dari mereka. Penggunaan modal ini berdampak signifikan pada peningkatan fasilitas di kawasan wisata, dan masyarakat ini menunjukkan kurangnya keberhasilan yang optimal dari indikator ini melalui model kemitraan sinergis dalam pengembangan fasilitas, yang pada akhirnya menciptakan kepemilikan lokal dan peluang kerja berkualitas.

4. Pemanfaatan Sumberdaya Secara Berlanjut

Sunaryo (2013) menyatakan bahwa dalam pembangunan pariwisata, sumber daya yang digunakan harus dikelola secara berkelanjutan, yang berarti aktivitasnya harus menghindari penyalahgunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Program pembangunan juga harus memastikan pemeliharaan dan perbaikan sumber daya alam dan buatan yang digunakan, dengan mengacu pada kriteria dan standar internasional yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimiliki oleh Wisata Bukit Suligi mencakup aspek alamiah (seperti keunikan dan kekhasan samudera awannya, beragamnya fauna dan satwa liar,

kegiatan rekreasi perairan, dan lintas alam), sumber daya manusia, sumber daya budaya (termasuk kuliner), dan sumber daya pariwisata khusus (seperti jalur trekking, sunrise hunt, dan camping).

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia terkait pengelolaan pariwisata alam, pemanfaatan sumber daya di Wisata Bukit Suligi di Desa Aliantan belum memenuhi berbagai prinsip, termasuk kelestarian fungsi ekosistem, kelestarian objek daya tarik wisata alam, kelestarian sosial budaya, kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung, serta manfaat ekonomi. Prinsip yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung, khususnya terkait dengan keamanan berupa batas yang diizinkan utk dilalui wisatawan dan batas jurang.

5. Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, penting untuk menciptakan kondisi harmonis antara wisatawan, kawasan wisata, dan masyarakat lokal dengan mewadahi aspirasi masyarakat terkait lingkungan pariwisata yang mereka harapkan. Menurut Sunaryo

(2013), indikator keberhasilan dari prinsip ini adalah upaya yang dilakukan untuk menerima aspirasi masyarakat. Wisata Bukit Suligi di Desa Aliantan telah berhasil mengimplementasikan indikator ini secara baik dan optimal melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) pada tahap awal pembentukan wisata ini. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program adalah kunci. Kegiatan ini memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan gagasan mereka serta mengidentifikasi isu-isu yang relevan di sekitar kampung.

Beberapa isu prioritas kemudian dipilih untuk dijadikan fokus dalam pengembangan wisata. Hingga saat ini, upaya untuk menerima, mengalirkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan wisata terus berlanjut. Pokdarwis The Caretaker berperan dalam berdiskusi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan untuk menampung ide-ide terkait

pengembangan wisata serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti bersama-sama dengan Pemerintah Daerah atau swasta.

6. Daya Dukung Lingkungan

Menurut Sunaryo (2013), indikator ini menegaskan bahwa dalam pembangunan pariwisata, perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan fasilitas dan kegiatan pariwisata. Pembangunan harus sesuai dengan batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada, serta program dan kegiatan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk penyesuaian dini. Skala dan jenis fasilitas wisata harus sesuai dengan batas penggunaan yang dapat diterima.

Evaluasi terhadap kriteria keaslian lingkungan fisik dan sosial-ekonomi, serta citra pariwisata dan produk wisata, menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan fisik telah mendukung ekowisata dengan menjaga sistem ekologi, konservasi satwa liar dan vegetasi, tingkat kebersihan, dan daya tarik lanskap. Secara ekonomi, manfaat bagi masyarakat lokal dan

biaya produk wisata telah sesuai dengan pengalaman wisata yang ditawarkan. Secara sosial budaya, dampak kedatangan wisatawan tidak merugikan dan keramahan masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan Wisata Bukit Suligi di Desa Aliantan. Namun, beberapa masalah menghambat optimalitas indikator ini, seperti kurangnya jaringan telekomunikasi yang memadai, pembuangan sampah pengunjung, serta maraknya penebangan pohon secara illegal dan mengubah fungsi hutan lindung dengan mengubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit yang mengganggu kondisi alami samudera awan. Masalah lainnya adalah kurangnya keberadaan kesenian, kerajinan, dan penampilan budaya di kawasan tersebut.

7. Monitoring dan evaluasi program

Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, tentu telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk memastikan kesesuaian rencana kerja dengan kebutuhan dan karakteristik suatu destinasi wisata, diperlukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau pencapaian rencana serta menilai target yang telah tercapai atau

belum terwujud. Pemerintah desa bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, melakukan monitoring melalui pembinaan. Awalnya dilakukan pengawasan di kawasan wisata untuk mengidentifikasi kekurangan, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan untuk mengembangkan potensi dan mengatasi masalah yang ada.

8. Akuntabilitas Lingkungan

Sunaryo (2013) dalam karyanya menyoroti perlunya memperhatikan dampak pembangunan pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat, terutama dari segi ekonomi dan sosial-budaya. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan pariwisata. Konsep akuntabilitas pada dasarnya terkait erat dengan administrasi publik, di mana para pelaku memiliki kewajiban untuk mengelola dan melaporkan penggunaan sumber daya publik agar dapat dipertanggungjawabkan, dipertanyakan, dan dipersalahkan. Ini bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum, transparansi, keadilan, dan kesetaraan dalam pengelolaan ekowisata.

Di Wisata Bukit Suigi Desa Aliantan, prinsip ini belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun terdapat komitmen dari para pelaku dalam bentuk aktivitas, mekanisme pertanggungjawaban masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal pelaporan pelaksanaan. Hal ini menyebabkan, akuntabilitas lingkungan saat ini hanya tercermin dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator GGT.

9. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Untuk mendukung pertumbuhan ekowisata, sangat penting untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang pariwisata berkelanjutan, manajemen bisnis pariwisata, dan topik terkait lainnya. Meskipun telah ada beberapa pelatihan terkait pariwisata di Desa Aliantan, namun kurangnya output terkait pelatihan yang telah dilaksanakan, baik dari pihak penyelenggara maupun peserta, menjadi hambatan dalam mengamati perkembangan secara pasti. Pelatihan-pelatihan tersebut telah mencakup topik-topik yang

relevan dengan pariwisata berkelanjutan, seperti pelatihan untuk menjadi pemandu wisata, keterampilan keramahan, pemahaman sejarah dan kebudayaan lokal, keterampilan berbicara di depan umum, penyusunan paket wisata, serta manajemen bisnis dan pemasaran destinasi wisata.

10. Promosi Dan Advokasi Nilai Budaya

Dalam upaya menjalankan kepariwisataan berkelanjutan, promosi menjadi suatu kebutuhan yang esensial untuk memperkuat karakter dan identitas tempat wisata serta komunitas lokal. Promosi bukan hanya tentang menarik minat wisatawan, tetapi juga mengedukasi mereka tentang nilai-nilai penting dari destinasi tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Sunaryo (2013). Beberapa pihak telah berusaha melakukan promosi terkait Wisata Bukit Suligi di Desa Aliantan. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Jejaring Desa Wisata (JADESTA) di situs web mereka, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang turut mempromosikan melalui platform media sosial seperti situs web resmi, akun Instagram, dan kanal

YouTube mereka. Di samping itu, masyarakat juga turut berperan khusus dalam promosi ini, khususnya Pokdarwis The Caretaker yang bekerjasama dengan komunitas-komunitas pecinta alam dan pendakian. Meskipun upaya promosi sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang perlu diperhatikan. Informasi terkait destinasi ekowisata masih kurang lengkap, dan kurangnya pembaharuan informasi atau kegiatan wisata juga menjadi hal yang perlu diperbaiki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa kolaborasi aktif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam Wisata Bukit Suligi di Desa Aliantan telah mencapai tingkat yang memadai. Dari sepuluh indikator yang dianalisis, lima di antaranya telah berhasil mencapai hasil optimal, seperti kemitraan kepengurusan lokal yang berhasil dikelola dengan baik, dan pengakomodasian aspirasi masyarakat melalui mekanisme seperti FGD. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang belum mencapai tingkat optimal, seperti kurangnya identifikasi sumber daya untuk partisipasi masyarakat dan kurangnya fasilitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan efisiensi Wisata Bukit Suligi di Aliantan, beberapa saran dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat terlibat:

1. Peningkatan Komunikasi: Diperlukan peningkatan komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Komunikasi eksternal antara lembaga swasta dan instansi pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus diperkuat untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, komunikasi antarbidang di dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu juga harus ditingkatkan untuk memastikan sinergi antar bagian yang saling terkait.
2. Pencatatan yang Komprehensif: Dibutuhkan pencatatan yang lengkap dan diperbarui terkait sumber daya pariwisata dan pelatihan yang dilakukan. Hal ini akan membantu dalam mengukur pencapaian setiap lembaga dan memahami dampaknya terhadap peningkatan kemampuan masyarakat. Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan Wisata Bukit Suligi di Desa Aliantan dapat terus meningkatkan kualitasnya dan

memberikan dampak yang lebih positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2011). *Konsep dan Implementasi Good Governance serta Pemberdayaan Masyarakat di Rokan Hulu: Menuju Kabupaten Terbaik di Provinsi Riau*. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Hardani, Auliya, N., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E., Sukmana, D., & Istiqomah, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Kadji, J. (2015). Optimalisasi Tata Kelola Sektor Pariwisata Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ad'ministrare*, 2(1).
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi: Politeknik Kridatama Bandung*.
- Masitah, I. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandara. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6, 45–56.
- Monika, T. (2020). Fasilitas Ekowisata Bukit Suligi Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. *Jom Fisip*, 7, 1–20.
- Monika, T., Mariaty, P., Program, I., Usaha, S., Wisata -Jurusan, P., & Administrasi, I. (n.d.). *Fasilitas Ekowisata Bukit Suligi Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu* (Vol. 7).
- Pradana, G. W., Rahman, A., & Haryono, H. (2021). *Tourism*

- Village Management Requires Good Tourism Governance: Study in the Kampung Lampion Code 18 Yogyakarta area. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 20–27.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p20-27>
- Pramusinto, A., & Kumorotomo, W. (2009). *Governance Reform di Indonesia*. Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dri Korupsi, Kolusi, Nepotisme, (1999).
- Republik Indonesia. (2009). *UU Nomor 10 Tahun 2009*.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Santosa, P. (2020). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Adimata.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. IKAPI.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (Cet.1)*. Gava Media.
- Sutiarso, M. A. (2018). Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata. *OSFpreprint*, 1–11.
- Thoha, M. (2008). *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Wahyuni, R. T., & Nawangsari, E. R. (2021). Development Of Kampung Wisata Lawas Maspati Surabaya As Tourism Heritage In Good Tourism Governance Perspective. *Dia*, 19(2), 267–281.
<https://doi.org/10.30996/dia.v19i2.5581>
- Wahyuningsih, S. (2018). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba*.
<https://tinyurl.com/2y9b48w7>
- Wardana, A. (2020). *Good Tourism Governanve Dalam pengelolaan Beautiful Malino Kabupaten Gowa*.
- Zulkarnain, D. (2020). *Model Pembangunan Desa Wisata Dalam Perspektif Good Governance (study pada desa wisata di desa Pongkar)*.
<https://doi.org/10.0506/jkg.v1i1.28>